



Peran Tuha Peut Dalam Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Gampong Ujong Drien

Selfia Yolanda¹, Nailis Saadah², Susila Fitri³, Nirja Putra⁴, Sopar⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: : yolandaselvia412@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 19, 2025

Available online July 19, 2025

Kata Kunci:

Tuha Peut, Pemberdayaan, Masyarakat

Keywords:

Tuha Peut, Empowerment, Community



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Gampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola pemberdayaan masyarakat yang ada di GampongUjongDrien. Tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan gampong. Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada Peran Tuha Peut dalam Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat GampongUjongDrien. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang kompleks yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Gampong is the lowest level of government in the government system in Indonesia. In recent years, gampong or villages have been given great authority in carrying out village governance, especially in managing community empowerment in Gampong Ujong Drien. Tuha Peut is given authority in carrying out supervisory functions, especially supervising the performance of the village government. The formulation of the problem in this study is limited to the Role of Tuha Peut in Planning Community Empowerment in Gampong Ujong Drien. This study includes qualitative research as a process to provide a complex understanding of what happens in community empowerment.

1. PENDAHULUAN

Tuha Peut di GampongUjongDrien memiliki latar belakang yang kuat dalam sistem pemerintahan dan adat istiadat masyarakat Aceh. Tuha Peut merupakan lembaga adat yang berperan sebagai badan permusyawaratan Gampong dan memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan GampongDalam konteks Aceh, Tuha Peut memiliki peran dalam menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, serta membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka juga berperan dalam mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari-atIslam.

Desa dalam kajian ilmu ketatanegaraan merupakan struktur pemerintahan terendah dalam wilayah administratif terkecil, sehingga desa diberikan kewenangan dalam hal mengelola dan mengembangkan wilayah kekuasaannya. Sehingga untuk mengatur kewenangan tersebut dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.Gampong adalah pemeritahan desa yang

dipimpin oleh seorang keuchik. Dalam melaksanakan roda pemerintahan seorang keuchik dibantu oleh perangkat gampong. Selain dari keuchik dalam sebuah pemerintahan gampong juga diawasi oleh tuhapeut.

Lahirnya UU tentang desa membuka ruang bagi pemerintahan gampong untuk mengelola dana dari pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian di gampong-gampong, adanya pengelolaan dana tersebut yang diberikan kepada gampong berpotensi korupsi. Potensi korupsi tersebut sangatlah besar, karena pengelolaan keuangan tersebut dikelola oleh gampong secara mandiri. Pengelolaan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengawasan maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan atau memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Agar tujuan negara tercapai seperti amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan sebuah badan yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dalam hal ini, seperti halnya dengan gampong di Aceh, desa juga memiliki tuhapeut atau istilah lain yaitu Badan Permusyawaratan Desa.

2. METODE

Penelitian tentang Peran Tuha Peut dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat Gampong Ujong Drien kegiatan ini dilakukan pada 22 Februari 2025 menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain yang diteliti dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian jenis deskriptif ini menggunakan teknik wawancara, observasi, yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara rinci kejadian yang faktual dan akurat terkait Peran Tuha Peut Gampong dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat Gampong Ujong Drien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tuha Peut Dalam Pembahasan Qanun Gampong

Tuha Peut dalam konteks Ujung Drien memiliki peran yang signifikan dalam pembahasan qanun gampong. Seperti pengembangan qanun gampong tuha peut dapat berperan di dalam hal tersebut dan juga dapat memastikan bahwa peraturan gampong atau kecamatan sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama. Selain itu peran tuha peut sebagai pengawasan pelaksanaan yang dimana tuha peut dapat memastikan bahwa peraturan gampong atau kecamatan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat gampong.

Peran Tuha Dalam Pengawasan Pemerintah Gampong

Tuha Peut memiliki peran dalam pengawasan pemerintah gampong sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintahan gampong dapat berjalan dengan baik dan efektif seperti mengawasi pelaksanaan anggaran gampong untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat gampong. Selain itu tuha peut juga mengawasi pelaksanaan

program-program yang dijalankan oleh pemerintah gampong untuk memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat gampong dan dijalankan dengan baik.

Peran Tuha dalam Memberi Nasehat dan Pendapat Kepada Keuchik

Tuha Peut memberikan nasehat dan pendapat kepada keuchik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintah gampong. Selain itu tuha peut juga membantu keuchik dalam pengambilan keputusan dengan memberikan masukan dan saran yang bijak dan berdasarkan pengalaman, tuha peut juga memberikan saran kepada keuchik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat gampong.

Gampong Ujong Drien merupakan Gampong yang terletak di Kecamatan Meureubo. Gampong tersebut memiliki adat-adat meulaot yang sangat kuat dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya juga memiliki peran Tuha Peut dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat Gampong Ujong Drien yang bernama Nawawi, beliau menjabat sebagai tuha Peut sudah 25 tahun. Peran tuha Peut di Gampong Ujong Drien tersebut yang pertama berhubungan dengan pemerintahan desa sebagai perancang aturan-aturan yang ada di desa, yang kedua tentang APBG (Anggaran Pendapatan Gampong) kemudian persetujuan kepada masyarakat Gampong Tuha Peut juga memiliki jajarannya, dan juga Tuha Peut memiliki fungsi dalam masyarakat sangat penting misalnya seperti permasalahan-permasalahan di Gampong terutama permasalahan keluarga dan juga rukun tetangga.

Tuha peut merupakan lembaga gampong yang hampir menyerupai peran legislatif ditingkat gampong gampong. Sedangkan untuk eksekutif merupakan unsur dari geuchik dan perangkat Imeum Meunasah. Unsur-unsur tuha peut terdiri dari masyarakat gampong yang dipilih oleh masyarakat gampong itu sendiri secara musyawarah dan mufakat.

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, peran lembaga tuha peut sangat mempengaruhi roda pemerintahan gampong. Karena lembaga tuha peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi tuha peut, maka bisa diartikan bahwasanya tuha peut adalah lembaga permusyawaratan gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi tuha peut ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

Tuha peut memiliki fungsi pengawasan karena merupakan bagian dari legislatif gampong, sehingga diatur dalam peraturan daerah. Adapun tugas dan fungsi tuha peut gampong sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah sebagai berikut:

Tuha peut gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;

- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Tuha Peut sehari-hari di Gampong yaitu sebagai perancang aturan-aturan yang ada di desa dan juga memiliki fungsi dalam masyarakat sangat penting misalnya seperti permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar (et. al.), Kamus Aceh Indonesia 2, Seri M-Y, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 617.
- Duhri, Saufuddin. 2009. Peusjuek: sebuah Tradisi Ritual sosial Masyarakat Pasee dalam Perspektif Tradisionalis dan Reformis. Lhokseumawe, 27-28 Juni 2008. Di dalam *Prosiding International: The 3rd International Conference On Development of Aceh (ICDA-)*, Lhokseumawe, Unimal Pres, 2008. Halaman 636-656.
- Iskandar. 2010. Perayaan Mameugang dalam Perspektif Hukum Islam. Laporan Penelitian Dosen. Lhokseumawe-Aceh: STAIN Malikussaleh.
- Ismail, Badruzzaman. 2003. Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Banda Aceh: Gua Hira.
- Munar, Zaitun, Agussabti, and Irwan A. Kadir. "Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no. 4 (2018): 508-17.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.
- Santriani, E. (2017). Tradisi MeeBuu Pandangan Masyarakat Trienggadeng dalam Konteks Budaya dan Agama. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 28.
- Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, jilid 1, (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 90-91.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.